TAHUN 2023-2026

BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI

RENSTRA BAPPEDA

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Bekasi.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bappeda dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 30 Mei 2022

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19650504 199403 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BEKASI 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 7
2.1.1 Tugas dan Fungsi 7
2.1.2 Struktur Organisasi 14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia 14
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana 17
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi 18
2.4 Tantangan, dan Peluang Pengembangan Pelayanan 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 24

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 24
3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Propinsi 26
3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian 26
3.2.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi 32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 37
3.4 Penentuan Isu –Isu Strategis 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 45

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 56

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda 56

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77

BAB VIII PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai berdasarkan Golongan ruang	15
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	15
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan	16
Tabel 2.5	Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda 2017-2022	20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda 2017-2022	21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	24
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	
Tabel 3.3	Telaahan IKU Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024	29
Tabel 3.4	Keterakaitan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi	32
Tabel 3.5	Telaahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat	35
Tabel 3.6	Keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi	36
Tabel 3.7	Pusat Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi	40
Tabel 3.8	Isu-isu Strategis Bappeda	38
Table 4.1	Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah	47
Tabel 4.2	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Tahun 2023-2026.	54
Tabel 4.3	Formulasi Perhitungan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tahun 2023-2026	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Bappeda	57
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda	58
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Bappeda Tahun 2023-2026	61
Tabel 7.1	Keselarasan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 Dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026	78
Tabel 7.2	Target Indikator Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2023-2026	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda	14
Gambar 2.2	Lokasi Gedung Bappeda	17
Gambar 3.1	Peta Rencana Strutur Ruang Kabupaten Bekasi	40
Gambar 3.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi	42
Gambar 7.1	Alur proses Cascading Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah	79

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil- hasilnya. Dalam prosesnya, dinamika pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu kepala daerah dalam

menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi merupakan rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta bersifat indikatif.

Dalam hal penyusunan RPJMD, bahwa setelah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, pemerintah mendorong efisiensi anggaran yang berujung pada dilaksanakannya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun 2016). Hal tersebut berimplikasi pada penyusunan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru juga dilaksanakan serentak. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan masa periode RPJMD tahun 2017-2022 dan belum dapat melaksanakan Pilkada, maka dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, RPD Kabupaten Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026 dan memperhatikan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun tahapan Penyusunan Renstra Bappeda terdiri dari:

(1) Persiapan Penyusunan Renstra
(2) Penyusunan Rancangan Renstra
(3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

(4) Penetapan Renstra

(5) Penyusunan Renstra

Gambar 1.1

Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan

Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi bangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
15. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026 yang disebut juga Renstra Transisi Bappeda Tahun 2023-202 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bappeda selama kurun waktu empat tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah untuk :

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka merencanakan, mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
- Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara rinci apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkt Daerah melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penutup dari isi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi berkedudukan sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Perencanaan dan Pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi yang meliputi bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- Koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan daerah
- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
   1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perencanaan;
   2. Sub Bagian Keuangan;
   3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
   1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan;
   2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
   3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pendanaan, Data dan Informasi.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
   1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pemerintahan;
   2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pembangunan Manusia ;
   3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Kesejahteraan Masyarakat.
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
   1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perekonomian;
   2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Ekonomi Kreatif;
   3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Alam.
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
   1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Kebinamargaan dan Perhubungan;
3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Keciptakaryaan an Kewilayahan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Tugas pokok : Merumuskan Kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan konsultasi penyusunan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya

alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4. Pembinaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

B.SEKRETARIS

Tugas pokok : memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

1. pengoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup Badan;
2. pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
3. pengoordinasiaan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Sekretariat Badan;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

C. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi :

1. perencanaan operasional urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan program urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. pembagian pelaksanaan tugas, pemberian petunjuk dan penyeliaan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. pengaturan, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

E. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Tugas pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

G. SUBKOORDINATOR

Pengertian : Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok : melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok fungsi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas pokok: Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan dan memiliki tanggungjawab koordinatif kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

I. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Tugas pokok: Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, bertanggungjawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi diatasnya atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

2.1.2 Struktur Organisasi

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bekasi
(Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi)

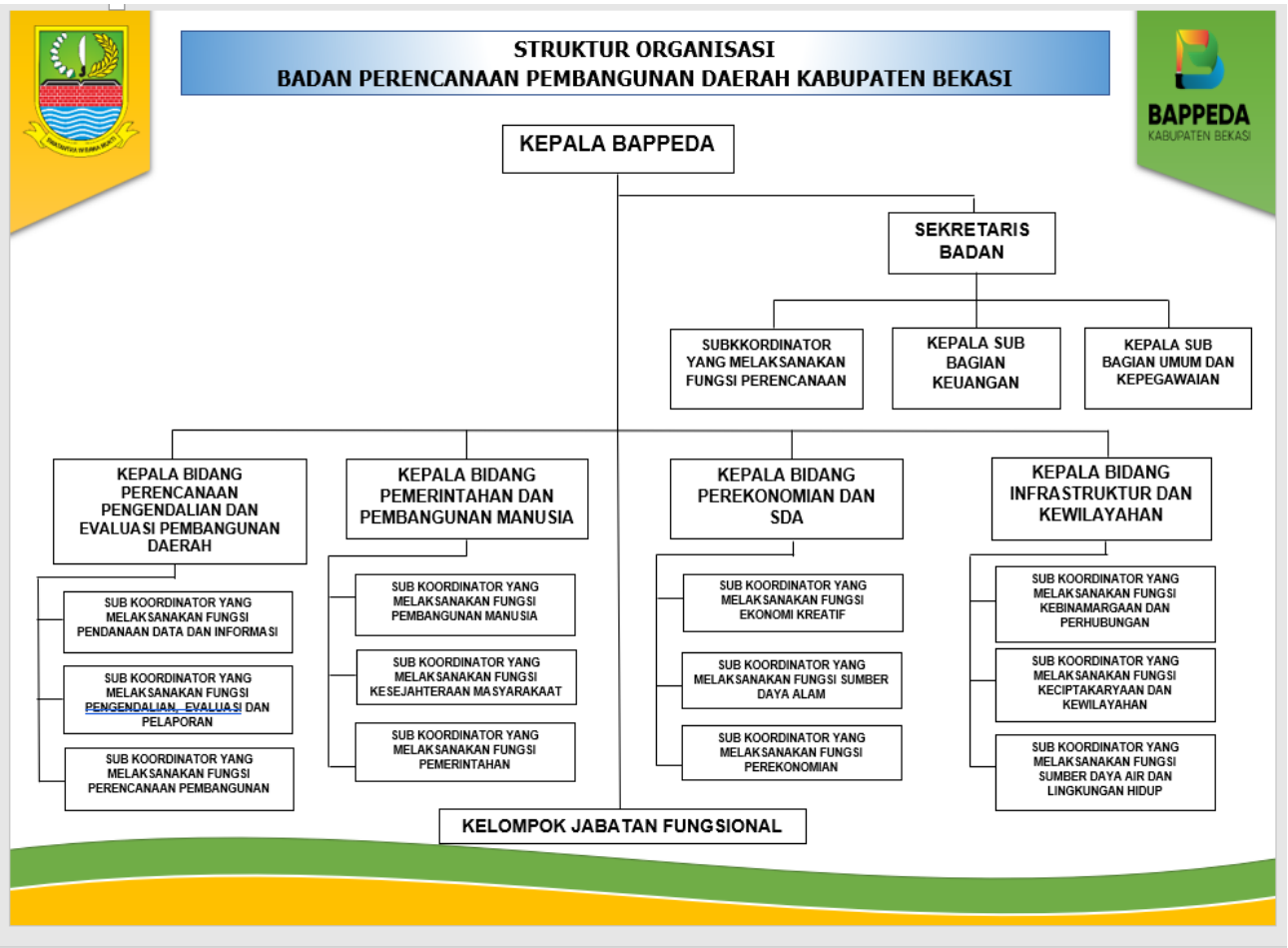

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Bekasi berdasarkan data sampai bulan Februari Tahun 2022 berjumlah 56 orang Pegawai Negeri Sipil dari jumlah total kebutuhan pegawai sebanyak 71 orang. Adapun komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan, tingkat

Pendidikan dan Jenjang Jabatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	26 Orang
2	Perempuan	30 Orang
	Jumlah	**56 Orang**

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	IV	9 Orang
2	III	44 Orang
3	II	3 Orang
	Jumlah	**56 Orang**

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana (S2)	23 Orang
2	Sarjana (S1)	28 Orang
3	SMA	5 Orang
	Jumlah	**56 Orang**

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-2 dan S-1 sebanyak 51 orang atau 91,07% dari total pegawai.

Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah aparatur Bappeda yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 28 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 50% dari seluruh aparatur Bappeda.

Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tank* nya Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai	Kekurangan / Kelebihan
1	Esselon II	1 Orang	1 Orang	-
2	Esselon III	5 Orang	5 Orang	-
3	Esselon IV	2 Orang	2 Orang	-
4	Jabatan Fungsional Perencana (Subkoordinator)	13 Orang	13 Orang	-
5	Jabatan Fungsional Perencana	40 Orang	2 Orang	(-) 38 Orang
6	Jabatan Pelaksana	10 Orang	33 Orang	(+) 23 Orang
	Jumlah	71 Orang	56 Orang	(-) 15 Orang

Dalam Tabel 2.4 dijelaskan kondisi jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jenjang Jabatan, terlihat bahwa secara keseluruhan Bappeda mengalami kekurangan pegawai. Yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan SDM Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :

- Perlu adanya penataan pegawai melalui pengalihan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional Perencana melalui uji kompetensi sehingga dapat lebih mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas Bappeda sebagai badan perencana daerah.
- perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencana dan SDM tenaga administrasi, baik dari segi Tingkat Pendidikan maupun Kompetensi nya.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi berlokasi di dalam kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi dan terdapat dalam gedung Bappeda yang berbagi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bekasi. Berikut ini lokasi gedung Bappeda Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.2
Lokasi Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi

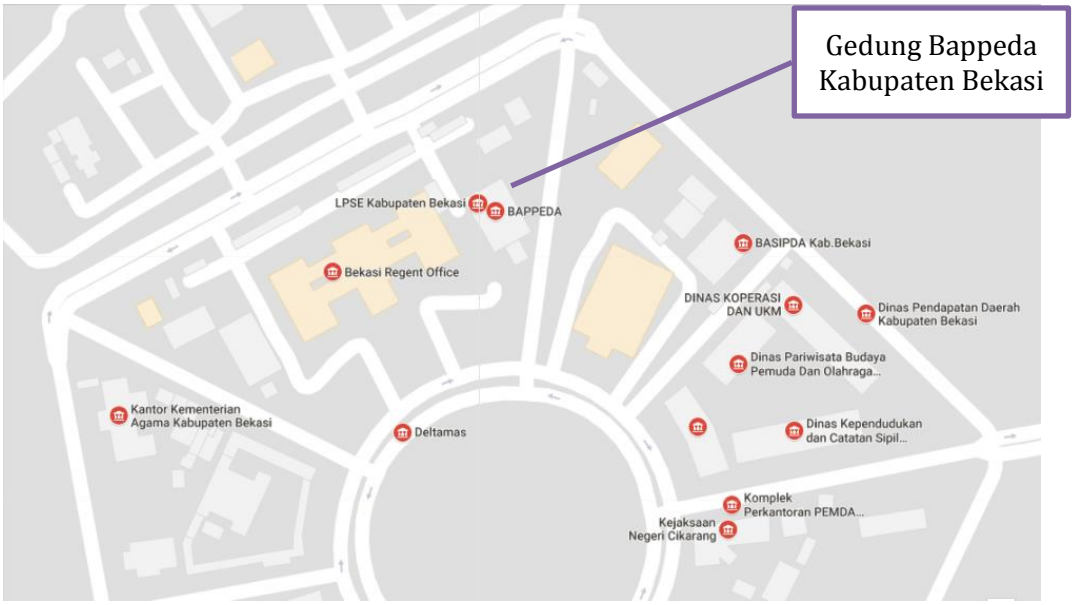

Secara umum kondisi Asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Asset, Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Bekasi

NO	ASET YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
A	**TANAH**		
	Sebidang Tanah		Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
B	**PERALATAN DAN MESIN**		
	Alat Angkut Roda 4 (Empat)	16 Unit	
	Alat Angkut Roda 2 (Dua)	8 Unit	
	Alat Kantor Rumah Tangga		
	AC	36 Unit	
	Kursi putar, dll	261 Unit	
	Lemari (Besi,Buku, Kayu, Loker,kaca)	93 Unit	
	Lukisan,jam dinding,bingkai Hiasan	13 Unit	
	Dispenser	5 Unit	

NO	ASET YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
	Filling Cabinet	23 Unit	
	Meja (Tamu,Komputer,Kerja,Bundar,Rapat)	113 Unit	
	Rak arsip	30 Unit	
	Rak server	1 Unit	
	Server	1 Unit	
	TV LCD/Smart tv	4 Unit	
	CCTV dan mesin	1 Unit	
	Layar infocus	7 Unit	
	Drone	1 Unit	
	Kulkas	1 Unit	
	Laci	12 Unit	
	Papan struktur	1 Unit	
	Peta	8 Unit	
	Alat Komunikasi		
	Komputer, laptop printer mesin tik, papersreder,proyektor	117 Unit	
	Speaker	4 Unit	
	Mic	15 Unit	
	Mixer	1 Unit	
C	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		
	Gedung Kantor Bappeda	1 Unit	
D	**ASET TETAP LAINNYA**		
	Buku	Eksemplar	

Sumber Data : Buku Inventaris, 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET IKU (%)	TARGET RENSTRA TAHUN KE- (%)					REALISASI TAHUN KE- (%)					CAPAIAN TAHUN KE- (%)					KET
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	
1	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	IKU
2	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Daerah				100	100	100	100	100	96,38	98,61	100	100	-	100	100	100	100	-	IKP
3	Persentase rekomendasi kebijakan pelaksanaan perencanaan yang telah ditidaklanjuti				80	85	90	95	100	88,24	100	100	100	-	80	85	90	95	-	IKP
4	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kajian yang ditindaklanjuti				80	85	90	95	100	100	100	100	100	-	80	85	90	95	-	IKP

Strategi / factor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :

1. Mensinergikan perencanaan mulai dari perencanaan desa, propinsi dan pusat dengan perencanaan daerah;
2. Pemetaan indikator sasaran kepala daerah dengan perangkat daerah;
3. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target sasaran daerah & perangkat daerah;
5. Meningkatkan kapasitas SDM Perencana.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.352.000.000	20.187.200.000	22.205.920.000	23.626.512.000	26.019.163.200	15.474.467.700	16.234.932.900	11.779.476.125	12.487.585.942	12.701.979.335	84,32	80,42	53,05	52,85	48,82	109	96

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utama Bappeda berkaitan dengan :

- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- Koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan daerah
- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

Maka dapat disampaikan tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

TANTANGAN	1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
	2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif
	3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Daerah dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah
	4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
	5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD
	6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah
	7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah
	8. Pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah baik segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat.
	9. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Perencana pada Bappeda dan Perangkat daerah.

Adapun Peluang yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pelayanan antara lain sebagai berikut :

PELUANG
1. Bappeda sebagai Badan yang membantu Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah, memiliki kewenangan dalam menelaah permasalahan pembangunan, isu-isu strategis kewilayahan, pemetaan pembangunaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta pengendalian atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Bappeda sebagai koordinator dalam kemitraan-kemitraan strategis yang membantu menghubungkan instansi perangkat daerah dengan instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dan swasta, dapat mengoptimalkan kerangka pendanaan pembangunan daerah dengan menggali skema-skema kemitraan seperti CSR, B2B (via Perusda), PPP, Hibah, atau Obligasi Daerah.
3. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik dapat dilakukan Kerjasama dalam penerapan E-Government/ SPBE. Hal ini merupakan peluang dalam pembangunan daerah dalam bidang penerapan E-Government.
4. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Bappeda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Bappeda sebagai think-tank melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (research based policy).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya Integrasi dan Sinkronisasi antar Program Nasional, Provinsi, Daerah dan Perangkat Daerah	Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data
			Belum optimalnya integrasi Rencana Aksi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya pemetaan permasalahan dan solusi atas permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara multi sektoral dalam proses perencanaaan pembangunan daerah (Pihak Swasta/ pengusaha, Akademisi, Komunitas, Media)
			Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD
			Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Belum optimalnya pengendalian pelaksanan atas perencanaan pembangunan daerah	Belum Optimalnya Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	Sumber-sumber pendanaan Non APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan
			Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (tercascading) secara individu
			Belum optimalnya pengendalian atas pencapaian sasaran yang menjadi program-program priotritas pembangunan dan Sasaran Daerah
			Perangkat daerah belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan
			Belum adanya standar atau pedoman pengendalian dan evaluasi bagi perencanaan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan
			Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) pada Program dan Kegiatan belum sampai kepada Evaluasi pencapaian Sasaran
			Monitoring evaluasi terkait kendala pelaksanaan dokumen perencanaan belum dilakukan secara mendalam dan continue kemudian dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi, hal ini juga sangat berdampak terhadap tingkat laju pelayanan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena Bappeda sebagai perangkat daerah sangat menentukan dalam pemetaan permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi, melakukan perencanaan pembangunan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, melakukan pengendalian atas perencanaan pembangunan serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atas kondisi permasalahan yang telah dijelaskan pada Tabel 3.1.

3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Provinsi

3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian

Bappeda Kabupaten Bekasi merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan daerah. Secara kelembagaan urusan perencanaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024.

A. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

B. Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa .

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

C. Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan - 1 :

- **Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronis dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- **Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan - 2 :

- **Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yangvisioner.

Tujuan - 3 :

- **Sasaran Strategis 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa					Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.		
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Peresentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024

Tabel 3.3
Telaahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2020-2024

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1	SS-1: Terwujudnya integrasi,sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	80	85	90	95
			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
	2	SS-2: Terwujudnya efektivitaspengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yangvisioner	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu StrategisPembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100 %
			3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi PembangunanNasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100 %
Mewujudkan tata kelolapelayanan perencanaanyang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
			b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di BidangPerencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
			c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

D. Telaahan keterkaitan antara Renstra K/L dan Perangkat Daerah

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat / Kementerian/ instansi Pembina di tingkat Pusat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dengan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Keterakaitan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi

NO	RENSTRA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHUN 2020-2024	RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026
	Terdiri dari 4 Sasaran dan 8 Indikator Sasaran antara lain :	Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran
1.	**SASARAN :** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	**SASARAN :** Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL d. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat e. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat f. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	**INDEKS PERENCANAAN** a) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat/Daerah. b) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah. c) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah.
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	PERSENTASE KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	**INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH** a. Presentase Capaian Program Prioritas Daerah b. Kinerja Capaian Sasaran Daerah

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu terkait dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan.

3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ***"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"***. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

A. Tujuan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, adalah :

"Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat"

B. Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu **Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan**.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu :

1. indikator *pertama*, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan *core business* Bappeda dan

2. Indikator *kedua*, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Telaahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran*		Indikator Sasaran*		Satuan	Target Kinerja					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					
1	Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	1	Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	1	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	persen	75	80	85	90	95	100
			2	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	2	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100

C. Telaahan keterkaitan antara Renstra provinsi dan Perangkat Daerah

Bappeda Propinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di tingkat propinsi Jawa Barat. Bappeda Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Propinsi /instansi Pembina perencanaan di tingkat propinsi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi

NO	RENSTRA BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023	RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026
	Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran antara lain :	Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran
1.	**SASARAN :** Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	**SASARAN :** Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	**INDEKS PERENCANAAN** a) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat/Daerah. b) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan

NO	RENSTRA BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023	RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026
		Perangkat Daerah. c) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah.
2.	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	**INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH** a. Presentase Capaian Program Prioritas Daerah b. Kinerja Capaian Sasaran Daerah

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu terkait dengan Indikator Sasaran yang sama-sama mengukur tingkat konsitensi perencanaan pembangunan, namun untuk indicator sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi juga mengukur kinerja pengendalian pembangunan daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

➢ **RTRW Kabupaten Bekasi**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 adalah pedoman untuk keberlangsungan pembangunan dan pengembangan wilayah baik dari segi ekonomi, tata ruang wilayah, kegiatan sosial maupun rencana-rencana strategis lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Bekasi.

A. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabekpunjur, meliputi perkotaan Tarumajaya, Setu, dan Tambun Selatan;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi perkotaan Cikarang Pusat, Cibarusah, Sukatani dan Cibitung;
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) meliputi, perkotaan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Cikarang Timur;
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi perkotaan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong dan Sukawangi;
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

1. Perhubungan: pelabuhan udara, pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A;
2. Ekonomi: pasar induk antar wilayah;
3. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B;
4. Pendidikan: perguruan tinggi.

Rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKWp, PKL, PKLd dan PPK, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas perkotaan Setu dan Kecamatan Tambun Selatan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu Jabodetabek. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau provinsi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Cikarang Pusat, Cibarusah, Sukatani dan Cibitung. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan beberapa bagian yang akan diusulkan dan dipromosikan menjadi PKLp antara lain perkotaan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Cikarang Timur. Namun, pembangunan atau peningkatan fasilitas tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan dalam kualitas pelayanan fasilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di dalam wilayah pelayanan. Desa pusat produksi diproyeksikan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari perkotaan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong dan Sukawangi.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan, terdiri dari Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.

Tabel 3.7
Pusat Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi

No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Pusat WP	Fungsi WP
1	I	**Tambun Selatan**	**Tambun**	●	pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri
2		Cibitung	Wanasari		
3		Cikarang Timur	Jatibaru		
4		Cikarang Barat	Telaga Asih		
5		Cikarang Utara	Cikarang Kota		
6		Cikarang Selatan	Sukadamai		
7	II	**Cikarang Pusat**	**Sukamahi**	●	utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata.
8		Cibarusah	Cibarusah		
9		Bojongmangu	Bojongmangu		
10		Setu	Ciledug		
11		Serang Baru	Sukasari		
12	III	**Sukatani**	**Sukamulya**	●	pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman
13		Pebayuran	Kertasari		
14		Sukakarya	Sukakarya		
15		Tambelang	Sukarapih		
16		Sukawangi	Sukawangi		
17		Cabangbungin	Lenggahjaya		
18		Karang Bahagia	Karangbahagia		
19		Kedungwaringin	Kedungwaringin		
20	IV	**Tarumajaya**	**Pantai Makmur**	●	pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung
21		Muaragembong	Pantai Mekar		
22		Babelan	Babelan Kota		
23		Tambun Utara	Sriamur		

Sumber: RTRW Kabupaten Bekasi, 2011-2031

Penyediaan dan pengaturan sarana pendidikan SD, SMP, SMU, SMK dan sekolah yang sederajat ditempatkan di masing-masing desa dan kecamatan. Penyediaan dan pengaturan sarana Pendidikan Tinggi (Akademi/Universitas) ditempatkan di Ibukota Kabupaten/Kota Cikarang dan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 3.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi

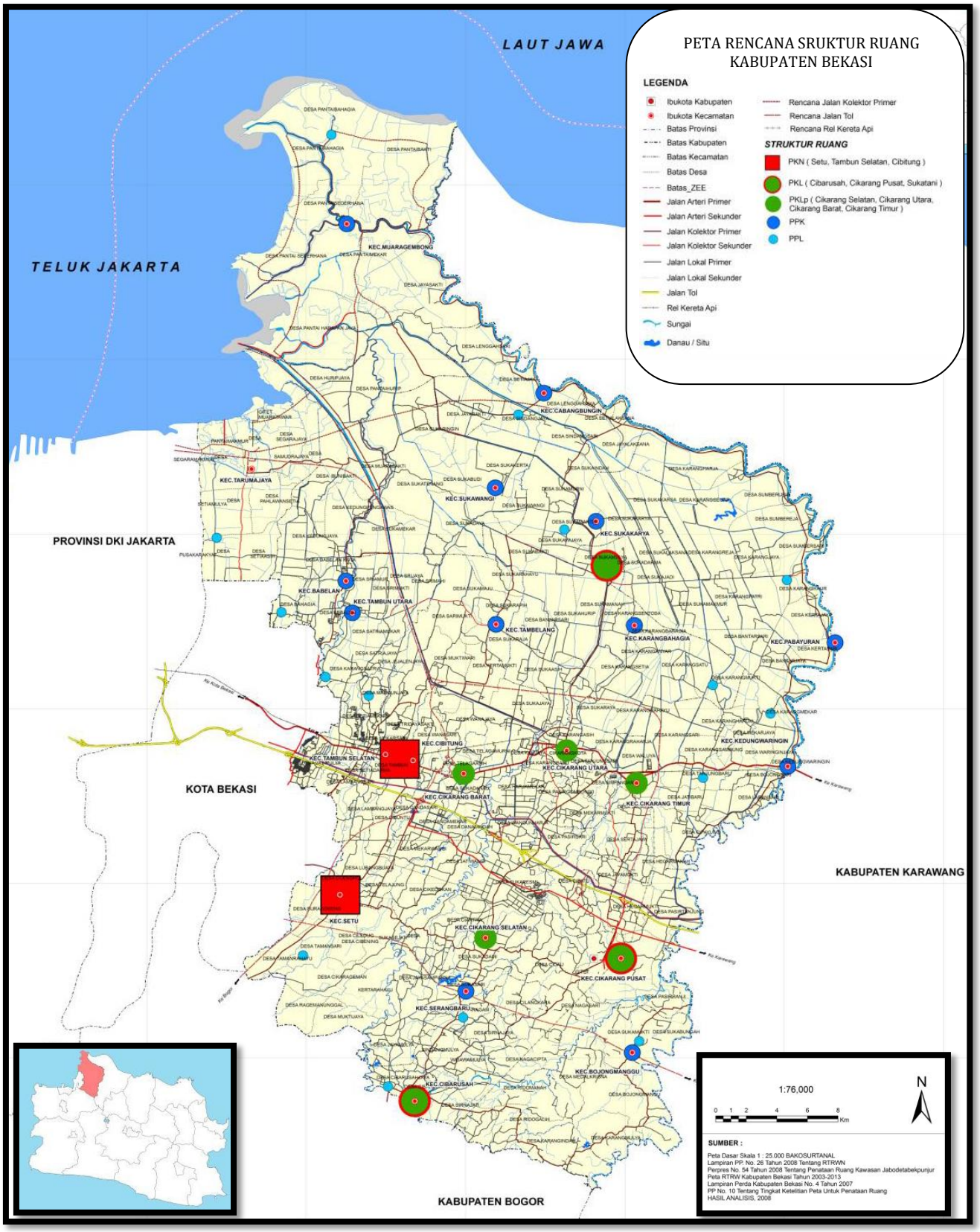

Sumber : RTRW Kabupten Bekasi 2011-2031

B. Recana Pola Ruang

Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dalam pembangunan dengan fungsi-fungsi ruang yang ada agar diperoleh pemanfaatan kawasan yang optimal sesuai dengan daya dukungnya. Luas kawasan lindung di Kabupaten Bekasi adalah 13.160 Ha.

Kawasan budidaya di Kabupaten Bekasi mempunyai luas 114.228,35 Ha, yang terdiri dari:

1. Kawasan Pertanian;
2. Kawasan/Lahan Peruntukan Industri;
3. Kawasan Permukiman;
4. Kawasan Pariwisata;
5. Kawasan Lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Bekasi antara lain Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendidikan, antara lain:

1. Pembangunan kawasan olahraga terpadu di Kecamatan Cikarang Pusat; dan
2. Pembangunan pusat kebudayaan di Kecamatan Tambun Utara.

Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi

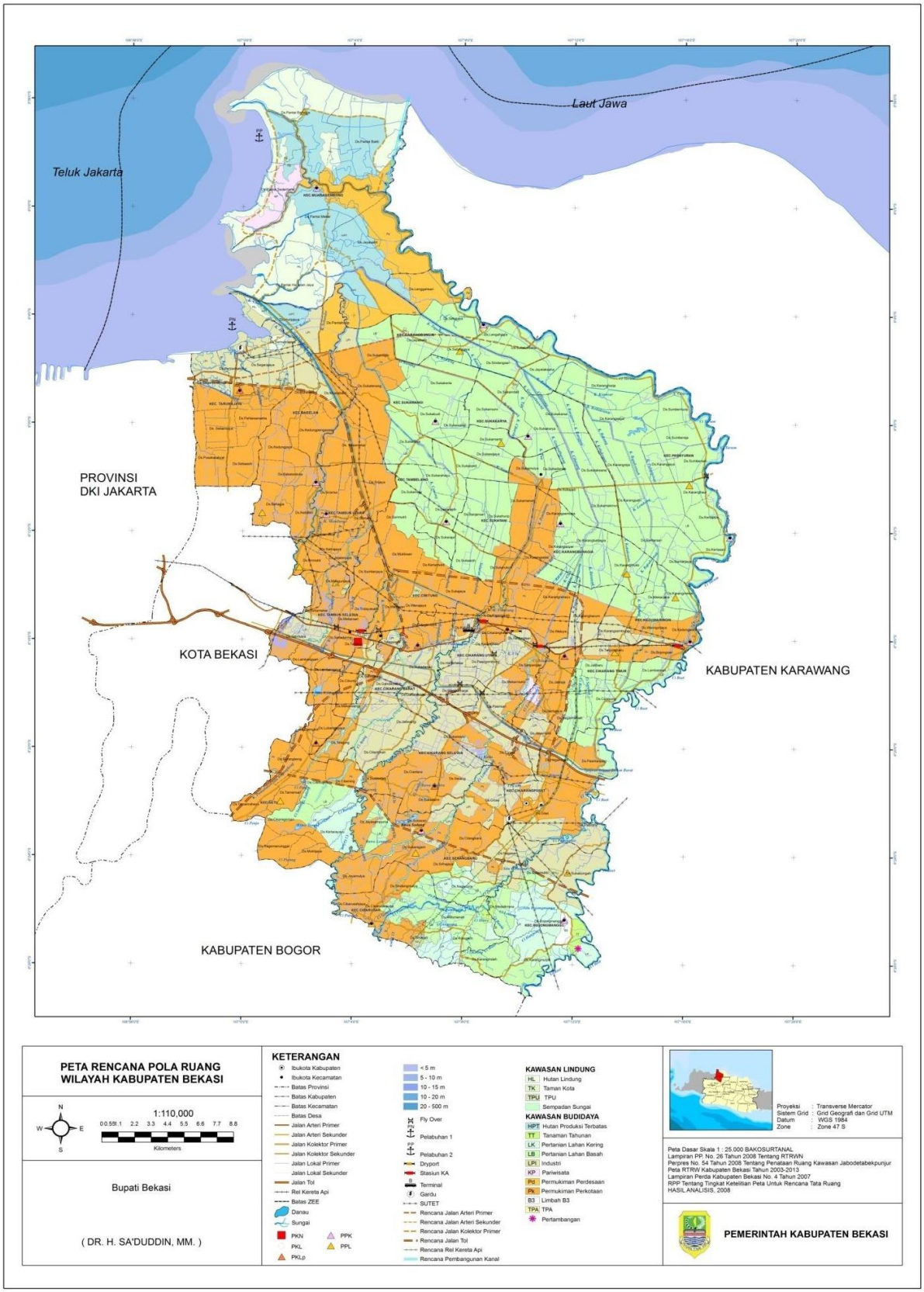

Sumber : RTRW Kabupten Bekasi 2010-2029

Terdapat lima isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bekasi. Lima isu strategis tersebut, yaitu :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, demografi dan sosial budaya;
b. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur kelembagaan;
c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya wilayah, yang meliputi :
   i. Sumber daya alam terutama lahan dan air sebagai faktor pendukung pembangunan sektor pertanian;
   ii. Sumber daya buatan terutama permukiman dan industri agar memberikan multiplier effect dalam perkembangan ekonomi serta mendorong perkembangan wilayah perdesaan sehingga terwujud keseimbangan perkembangan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
d. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik serta prasarana dan sarana wilayah dalam mendukung proses produksi dan distribusi hasil-hasil produksi dalam lingkup lokal, regional nasional dan internasional;
e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan peningkatan fungsi kawasan lindung; pengendalian pencemaran lingkungan; rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan kawasan dan lingkungan yang telah mengalami kerusakan; pemulihan kemampuan ekosistem sebagai penyangga kehidupan; dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

C. PERAN BAPPEDA DALAM RTRW

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan daerah, bappeda bertugas dalam melakukan pendampingan penyusunan dokumen Perangkat Daerah yang mendukung terhadap pencapaian Sasaran daerah. Dalam perencanaan RT/RW Kabupaten Bekasi Bappeda berperan mengkoordinasikan keselarasan antara RT/RW daerah dan perencanaan Daerah dan pemetaannya pada perangkat daerah sehingga pembangunan dapat terlaksana secara terarah dan terpadu.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan dari pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi yang telah dibahas pada Tabel 3.1 (Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Bekasi), serta ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi
- Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024
- Sasaran Jangka Menengah dari Bappeda provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Maka dapat disampaikan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Tabel 3.8

Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

NO	ISU STRATEGIS
1	Perlu adanya peningkatan keselarasan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
2	Perlu adanya peningkatan Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
3	Perlu adanya peningkatan pengendalian capaian sasaran program prioritas daerah
4	Perlu adanya peningkatan pengendalian capaian sasaran daerah dan perangkat daerah
5	Perlu adanya optimalisasi kerangka pendanaan pembangunan Daerah
6	Perlu adanya peningkatan Keakuratan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
7	Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Perencana yang profesional

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi Kabupaten Bekasi, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang mendukung capaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 antar lain sebagai berikut :

Table 4.1

Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					3. Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah
				3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	4. Indeks pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				4. Meningkatnya Indeks Kapabilitas APIP	5. Indeks Kapabilitas APIP	Inspektorat
				5. Meningkatnya Indeks maturitas SPIP	6. Indeks Maturitas SPIP	Inspektorat
				6. Meningkatnya kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah	7. Nilai Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah
				7. Terwujudnya sadar tertib arsip Kabupaten Bekasi	8. Nilai Pengawasan Kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				8. Mewujudkan Pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah	9. Indeks Inovasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				9. Terwujudnya Manajemen ASN yang Profesional dan Berdaya Saing	10. Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					11. Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				10. Terwujudnya proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik	12. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					13. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					14. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
				11. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima	15. Nilai Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16. Indeks Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				13 Meningkatnya Kinerja Penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah	17. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				14. Meningkatnya bangunan Gedung yang layak fungsi	18. Tingkat bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang layak fungsi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		2. Terwujudnya kondusivitas wilayah	2. Indeks Demokrasi (poin)	15. Optimalnya Pengembangan Iklim Demokrasi Daerah	19. Indeks Demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				16. Optimalnya Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi	20. Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi	Sekretariat DPRD
				17. Optimalnya Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan	21. Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan	Sekretariat DPRD
				18. Optimalnya Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif	22. Tingkat Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif	Sekretariat DPRD
			3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	19. Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	23. Indeks Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				20. Optimalnya Perkembangan Kesetaraan, Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	24. Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				21. Optimalnya Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	25. Indeks Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4. Indeks Resiko Bencana	22. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	26. Indeks Kapasitas Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				23. Mengoptimalkan Tata Kelola Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	27. Tingkat Waktu Tanggap Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran
				24. Meningkatnya Penanganan Banjir dan kekeringan	28. Indeks Resiko Bencana, komponen Kerentanan Bencana Banjir dan Kekeringan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				25. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	29. Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
			5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	26. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan	30. Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
					31. Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
					32. Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
				27. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	33. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				28. Optimalnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	34. Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				29. Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	35. Tingkat Akses Sanitasi Layak dan Aman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				30. Meningkatnya akses sanitasi layak komponen pelayanan	36. Cakupan akses sanitasi layak komponen pelayanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		3. Meningkatnya konektivitas wilayah	6. Tingkat konektivitas antar wilayah	31. Meningkatnya Konektivitas antar jalan kabupaten	37. Tingkat Konektivitas Antar Jalan Kabupaten	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				32. Tersedianya lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten	38. Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				33. Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	39. Cakupan layanan air minum	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				34. Meningkatnya Konektivitas antarperumahan dan permukiman	40. Tingkat Konektivitas Antar Permukiman dan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				35. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	41. Indeks Keselamatan Lalulintas Dimensi Perlengkapan Jalan, Kendaraan Laik Jalan, Management Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2. Persentase Penduduk Miskin	4. Meningkatnya Kualitas SDM	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	36. Meningkatnya kualifikasi pendidikan masyarakat	42. Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan
				37. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	43. Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan
				38. Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan dasar	44. Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				39. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat kabupaten	45. Angka Kelahiran Total (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				40. Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Administrasi Rumah Sakit yang Transparan dan akuntabel	46. Tingkat capaian standar mutu nasional RS	Rumah Sakit Umum Daerah
				41. Meningkatnya penguatan budaya literasi dan pembudayaan gemar membaca	47. Indeks Pembangunan Literasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					48. Nilai Kegemaran Membaca	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				43. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	49. Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				42. Meningkatnya kualitas Perlindungan Terhadap Anak	50. Indeks Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				44. Meningkatnya kualitas hidup pemuda	51. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				45. Meningkatnya pembangunan budaya	52. Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Literasi Budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				46. Pembinaan olahraga tradisional dan Pembangunan sarana olahraga rekreasi	53. Indeks Pembangunan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				47. Terwujudnya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional	54. Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				48. Terwujudnya pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	55. Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				49. Meningkatnya kualitas SDM	56. Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				50. Meningkatnya Produksi Pertanian	57. Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
				51. Peningkatan hasil produksi perikanan	58. Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan	Dinas Perikanan
				52. Meningkatnya Kemandirian Desa	59. Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				53. Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS	60. Tingkat Cakupan PPKS yang ditangani	Dinas Sosial
				54. Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif	61. Indeks Harga Konsumen	Dinas Perdagangan
				55. Menurunnya luasan kawasan kumuh di wilayah kabupaten	62. Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		5. Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja	8. Tingkat Pengangguran Terbuka	56. Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan	63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Ketenagakerjaan
				57. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dan Difasilitasi	64. Pengembangan sentra industri	Dinas Perindustrian
				58. Meningkatnya daya saing produk ekspor	65. Pertumbuhan Nilai Ekspor	Dinas Perdagangan
				59. Meningkatnya realisasi invesatasi	66. Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				60. Berkembangnya Destinasi Pariwisata	67. Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
				61. Meningkatnya Kualitas Koperasi	68. Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				62. Meningkatnya Daya Saing UMKM	69. Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam table 4.1 dijelaskan bahwa bappeda berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Sasaran Daerah : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Indikator sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi

- Sasaran Bappeda :
  1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Indikator Sasaran :
  1. Indeks Perencanaan
  2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Adapun penjabaran Sasaran Bappeda Tahun 2023-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	84,17 Poin	86,67 Poin	89,17 Poin	91,67 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	65 Poin	70 Poin	75 Poin	80 Poin

Tabel 4.3

Formulasi Perhitungan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi

Tahun 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN				TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
		PARAMETER & SUB PARAMETER		FORMULASI PERHITUNGAN	BOBOT	TAHUN 2023 (POIN)	TAHUN 2024 (POIN)	TAHUN 2025 (POIN)	TAHUN 2026 (POIN)
3	4	5		6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**INDEKS PERENCANAAN**	**INDEKS PERENCANAAN**			**100**	**84,17**	**86,67**	**89,17**	**91,67**
		1	**Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
					100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		a	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Jumlah program dalam RKPD / Jumlah program dalam RPJMD x 100%	20%	100%	100%	100%	100%
		b	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	Jumlah program, target, indikator dan nomenklatur program dalam Renstra / Jumlah program, target, indikator dan nomenklatur program dalam RPJMD x 100%	20%	100%	100%	100%	100%
		c	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	Jumlah program dalam Renja PD / Jumlah program dalam RKPD x 100%	20%	100%	100%	100%	100%
		d	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	Jumlah program dalam Renja PD / Jumlah program dalam Renstra PD x 100%	20%	100%	100%	100%	100%

		e	Persentase Keselarasan Indikator Sasaran Daerah yang sesuai pedoman	Jumlah Indikator Sasaran Daerah / Jumlah Indikator Sasaran Daerah yang sesuai Pedoman x 100%	20%	100%	100%	100%	100%
		2	**Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah**		**50**	**34,17**	**36,67**	**39,17**	**41,67**
					100%	**68%**	**73%**	**78%**	**83%**
		a	Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah program prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Daerah / Jumlah seluruh program prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh Daerah x 100%	25%	60%	65%	70%	75%
		b	Persentase Keselarasan Program Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah program prioritas Propinsi yang dilaksanakan oleh Daerah / Jumlah seluruh program prioritas Propinsi yang harus dilaksanakan oleh Daerah x 100%	25%	60%	65%	70%	75%
		c	Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah	Jumlah program prioritas Daerah yang dilaksanakan oleh PD / Jumlah seluruh program prioritas daerah yang harus dilaksanakan oleh PD x 100%	50%	85%	90%	95%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**100**	**65**	**70**	**75**	**80**
			Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah		**100**	**65,00**	**70,00**	**75,00**	**80,00**
					100%	**65%**	**70%**	**75%**	**80%**

		a Persentase rata-rata Capaian Sasaran Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah / persentase Sasaran Daerah x 100%	50%	70%	75%	80%	85%
		b Persentase rata-rata capaian Program Prioritas Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas / Persentase Target Program Prioritas x 100%	50%	60%	65%	70%	75%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Bekasi.

Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi dalam empat tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan	**1. Sasaran 1**	**1. Strategi 1**	**I Kebijakan 1**
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Daerah (RPJMD) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD)
			2. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Daerah (RPJMD) dengan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah)
			3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah)
			4. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah)
			5. Penyelarasan Indikator Sasaran Daerah sesuai dengan pedoman
		Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah	1. Penyelarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah
			2. Penyelarasan Program Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah
			3. Penyelarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah

	2. Sasaran 2	**2. Strategi 2**	**II Kebijakan 2**
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Pencapaian Sasaran Daerah
			2. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Pencapaian Sasaran Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran nya, Bappeda menggunakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	01	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	01	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	02	201	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
5	01	02	201	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik
5	01	02	201	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5	01	02	201	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	01	02	201	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5	01	02	201	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	202	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	202	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
5	01	02	202	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	203	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5	01	02	203	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	03	201	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	201	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	201	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	201	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

5	01	03	201	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	201	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	201	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	201	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	03	202	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	202	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	202	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	202	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	202	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	202	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	202	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	202	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	03	203	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	203	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	203	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	203	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	203	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	203	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	203	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	203	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									27.274.646.076		26.690.199.699		28.201.662.775		29.232.323.813	
Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah	Menigkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			INDEKS PERENCANAAN			80	84,17		86,67		89,17		91,67		91,67
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH			65,00	65,00		70,00		75,00		80,00		80,00
				5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						xxxxx		xxxxx		xxxxx		xxxxx	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			64,24	64,74		65,24		65,74		66,24		66,24

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**		**10 Dokumen**	**11 Dokumen**		**12 Dokumen**		**12 Dokumen**		**11 Dokumen**		**11 Dokumen**
							Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	**xxxxx**	5 Dokumen	**xxxxx**	5 Dokumen	**xxxxx**	4 Dokumen	**xxxxx**	3 Dokumen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan
				5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan
				5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**		**3 Laporan**	**3 Laporan**		**3 laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**
							Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	xxxxx	58 Orang/bulan	xxxxx	58 Orang/bulan	xxxxx	58 Orang/bulan	xxxxx	58 Orang/bulan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	xxxxx	1 Laporan	xxxxx	1 Laporan	xxxxx	1 Laporan	xxxxx	1 Laporan
				5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	xxxxx	19 Laporan	xxxxx	19 Laporan	xxxxx	19 Laporan	xxxxx	19 Laporan
				5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase Pegawai yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	**xxxxx**	1 Dokumen	**xxxxx**	1 Dokumen	**xxxxx**	1 Dokumen	**xxxxx**	1 Dokumen
				5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	-	-	60 Orang	**xxxxx**	60 Orang	**xxxxx**	60 Orang	**xxxxx**	60 Orang
				5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan**		**8 Layanan**	**8 Layanan**		**8 Layanan**		**8 Layanan**		**8 Layanan**		**8 Layanan**
							Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	**xxxxx**	3 Paket	**xxxxx**	3 Paket	**xxxxx**	3 Paket	**xxxxx**	3 Paket

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket
				5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket
				5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket	xxxxx	2 Paket
				5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	xxxxx	1 Dokumen	xxxxx	1 Dokumen	xxxxx	1 Dokumen	xxxxx	1 Dokumen
				5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan
				5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	xxxxx	5 Laporan	xxxxx	5 Laporan	xxxxx	5 Laporan	xxxxx	5 Laporan
				5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun**		**35 Unit**	**35 Unit**		**2 Unit**		**45 Unit**		**20 Unit**		**20 Unit**
							Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	**xxxxx**	2 Unit	**xxxxx**	45 Unit	**xxxxx**	20 Unit	**xxxxx**	20 Unit
				5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan**		**8 Laporan**	**8 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
				5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	**xxxxx**	2 Laporan	**xxxxx**	2 Laporan	**xxxxx**	2 Laporan	**xxxxx**	2 Laporan
				5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	**xxxxx**	6 Laporan	**xxxxx**	6 Laporan	**xxxxx**	6 Laporan	**xxxxx**	6 Laporan
				5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun**		**105 Unit**	**105 Unit**		**105 Unit**		**105 Unit**		**105 Unit**		**105 Unit**
							Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	xxxxx	24 Unit	xxxxx	24 Unit	xxxxx	24 Unit	xxxxx	24 Unit
				5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	xxxxx	1 Unit	xxxxx	1 Unit	xxxxx	1 Unit	xxxxx	1 Unit
				5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	xxxxx	80 Unit	xxxxx	80 Unit	xxxxx	80 Unit	xxxxx	80 Unit
				5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**xxxxx**		**xxxxx**		**xxxxx**		**xxxxx**	
						Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah			**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Propinsi dan Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah			68%	68%		73%		78%		83%		83%
						Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah			65%	65%		70%		75%		80%		80%
				5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen		6 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen
							Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD Persentase Keselarasan Indikator Sasaran dengan pedoman		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Propinsi dengan Daerah		60%	60%		65%		70%		75%		75%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0	0	0	1 Dokumen	xxxxx	0	0	0	0	0
				5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara
				5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara
				5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	2 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara	xxxxx	1 Berita Acara
				5.01.02.201.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	187 Usulan	187 Usulan	xxxxx	187 Usulan	xxxxx	187 Usulan	xxxxx	187 Usulan	xxxxx	187 Usulan
				5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	xxxxx	3 Dokumen	xxxxx	3 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen	xxxxx	2 Dokumen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**		**3 Dokumen**		**3 Dokumen**		**3 Dokumen**		**3 Dokumen**
							Persentase ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		**65%**	**65%**		**70%**		**75%**		**80%**		**80%**
				5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Masukan	3 Masukan	**xxxxx**	6 Masukan	**xxxxx**	6 Masukan	**xxxxx**	6 Masukan	**xxxxx**	6 Masukan
				5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	105 Orang	105 Orang	**xxxxx**	105 Orang	**xxxxx**	105 Orang	**xxxxx**	105 Orang	**xxxxx**	105 Orang
				5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	**xxxxx**	1 Buku	**xxxxx**	1 Buku	**xxxxx**	1 Buku	**xxxxx**	1 Buku

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen laporan Capaian Sasaran Daerah dan Program Prioritas Daerah	Jumlah Dokumen laporan Capaian Program Prioritas Daerah		2 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
							Jumlah Dokumen laporan capaian Sasaran Daerah			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
							Persentase capaian Program Prioritas Daerah		60%	60%		65%		70%		75%		75%
							Persentase capaian Sasaran Daerah		70%	70%		75%		80%		85%		85%
				5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan
				5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						xxxxx		xxxxx		xxxxx		xxxxx	
						Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100%	100%		100%		100%		100%		100%
						Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			68%	68%		73%		78%		83%		83%
						Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			65%	65%		70%		75%		80%		80%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			100%	100%		100%		100%		100%		100%
						Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			68%	68%		73%		78%		83%		83%
						Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			65%	65%		70%		75%		80%		80%
						Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100%	100%		100%		100%		100%		100%
						Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			68%	68%		73%		78%		83%		83%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			65%	65%		70%		75%		80%		80%
				5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Pemerintahan		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pemerintahan		100%	100%		100%		100%		100%		100%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Sasaran Daerah bidang Pemerintahan		70%	70%		75%		80%		85%		85%
							Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang Pemerintahan		60%	60%		65%		70%		75%		75%
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Pembangunan Manusia		100%	100%		100%		100%		100%		100%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pembangunan Manusia		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Sasaran Daerah bidang Pembangunan Manusia		70%	70%		75%		80%		85%		85%
							Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang Pembangunan Manusia		60%	60%		65%		70%		75%		75%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Kesejahteraan Masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Kesejahteraan Masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Sasaran Daerah bidang Kesejahteraan Masyarakat		70%	70%		75%		80%		85%		85%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang Kesejahteraan Masyarakat		**60%**	**60%**		**65%**		**70%**		**75%**		**75%**
				5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	**xxxxx**	7 Dokumen	**xxxxx**	4 Dokumen	**xxxxx**	4 Dokumen	**xxxxx**	4 Dokumen
				5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah	**xxxxx**	14 Perangkat Daerah

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan	xxxxx	3 Laporan
				5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	xxxxx	12 Dokumen	xxxxx	8 Dokumen	xxxxx	8 Dokumen	xxxxx	8 Dokumen
				5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah	xxxxx	8 Perangkat Daerah

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					n Manusia			Manusia										
				5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	8 Laporan	xxxxx	9 Laporan	xxxxx	8 Laporan	xxxxx	8 Laporan	xxxxx	8 Laporan
				5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**		**8 Dokumen**	**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Perekonomian		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Perekonomian		70%	70%		75%		80%		85%		85%
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Perekonomian		60%	60%		65%		70%		75%		75%
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Ekonomi Kreatif		100%	100%		100%		100%		100%		100%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Ekonomi Kreatif		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi Kreatif		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Ekonomi Kreatif		70%	70%		75%		80%		85%		85%
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Ekonomi Kreatif		60%	60%		65%		70%		75%		75%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Sumber Daya Alam		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sumber Daya Alam		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Sumber Daya Alam		70%	70%		75%		80%		85%		85%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Sumber Daya Alam		**60%**	**60%**		**65%**		**70%**		**75%**		**75%**
				5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	**xxxxx**	13 Dokumen	**xxxxx**	8 Dokumen	**xxxxx**	8 Dokumen	**xxxxx**	8 Dokumen
				5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah	**xxxxx**	7 Perangkat Daerah

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Bidang Perekonomian			Daerah Bidang Perekonomian										
				5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan	xxxxx	4 Laporan
				5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	xxxxx	7 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen
				5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah	xxxxx	3 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan
				5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**8 Dokumen**	**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		70%	70%		75%		80%		85%		85%
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		60%	60%		65%		70%		75%		75%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		85%	85%		90%		95%		100%		100%
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		70%	70%		75%		80%		85%		85%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		60%	60%		65%		70%		75%		75%
							Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		100%	100%		100%		100%		100%		100%
							Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		85%	85%		90%		95%		100%		100%

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		**70%**	**70%**		**75%**		**80%**		**85%**		**85%**
							Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		**60%**	**60%**		**65%**		**70%**		**75%**		**75%**
				5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	**xxxxx**	19 Dokumen	**xxxxx**	12 Dokumen	**xxxxx**	12 Dokumen	**xxxxx**	12 Dokumen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah	xxxxx	6 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan	xxxxx	6 Laporan
				5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	xxxxx	6 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen	xxxxx	4 Dokumen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah (Kewilayahan)	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah (Kewilayahan)	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah	xxxxx	23 Perangkat Daerah
				5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan	xxxxx	2 Laporan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded.*

- ***Specific***
  Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
- ***Measurable***
  Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- ***Agreeable***
  Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
- ***Realistic***
  Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- ***Time-bounded***
  Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi, pemilihan IKU juga harus didasarkan pada focus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Indikator ini merupakan parameter kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, sebagaimana tergambarkan dalam table berikut :

Tabel 7.1
KESELARASAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026
DENGAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023-2026

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Tabel 7.1 dijelaskan bahwa Sasaran Bappeda untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah tentu berpengaruh besar terhadap Sasaran Daerah dalam meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Begitu pula dengan Indikator Sasaran Bappeda yaitu Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah merupakan salah satu Indikator Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah pada area Akuntabilitas Kinerja.

Penentuan Target Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah telah disesuaikan dengan Target Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Bekasi. Target Indikator Sasaran Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Target Indikator Sasaran
RENSTRA BAPPEDA tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (POIN)				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INDEKS PERENCANAAN	84,17	84,17	86,67	89,17	91,67	91,67
2	INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	65	65	70	75	80	80

Kinerja Perangkat daerah dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama. Penurunan/Pemetaan Indikator Kinerja Utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan *logic model* penurunan kinerja organisasi.

Gambar 7.1

Alur Proses Cascading Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah

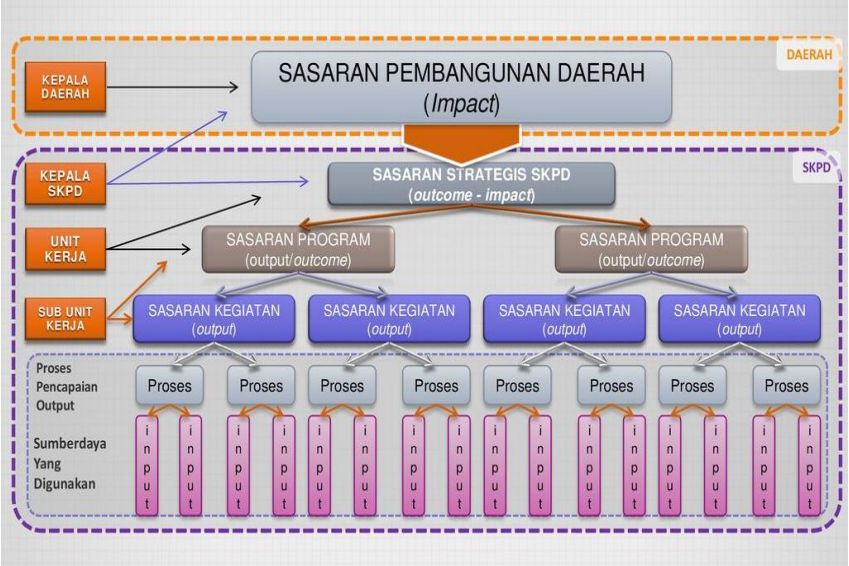

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan ASN Bappeda Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Bappeda serta tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 30 Mei 2022

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19650504 199403 2 008